



DINAMIKA KONFLIK SYIAH: AKAR HISTORIS, GEOPOLITIK KONTEMPORER, DAN UPAYA REKONSILIASI

Muhammad Munzir Azyumardi^{1*}, Nurlaelah Abbas², Indo Santalia³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*E-mail: azyumardi.muhammad@gmail.com

Received: 22-07-2025

Revised: 10-08-2025

Accepted: 21-11-2025

Abstract

The conflict between Shia and Sunni Islam has deep historical roots, originating from the succession dispute following the death of Prophet Muhammad. The events at Saqifah and the contested role of Ali ibn Abi Talib marked the beginning of political divergence that eventually evolved into theological conflict, particularly through the Shia doctrine of *Imāmah*, which stands in contrast to the Sunni concept of the caliphate. Over time, these differences solidified into distinct sectarian identities and have contributed to ongoing tensions, especially in the geopolitical sphere after the 1979 Islamic Revolution in Iran. Contemporary crises in Iraq, Syria, and Yemen illustrate how sectarian sentiments are often exploited for political purposes. Nevertheless, various reconciliation efforts have emerged, including the Amman Message and other inter-sectarian dialogues. This article aims to trace the historical origins of the Shia-Sunni conflict, analyze its contemporary geopolitical implications, and evaluate the challenges and prospects for peaceful coexistence within the Muslim world.

Keyword: Geopolitics; Reconciliation; Sectarian Conflict; Shia; Sunni

Abstrak

Konflik antara mazhab Syiah dan Sunni memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, yang berawal dari persoalan suksesi kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Saqifah dan posisi Ali bin Abi Talib menjadi titik awal perbedaan politik yang kemudian berkembang menjadi konflik teologis melalui doktrin *Imāmah* Syiah yang bertentangan dengan konsep kekhalifahan Sunni. Seiring waktu, perbedaan ini meluas dan memperkuat identitas masing-masing mazhab, serta menciptakan ketegangan yang terefleksi dalam konflik-konflik geopolitik kontemporer, terutama pasca-Revolusi Islam Iran 1979. Peristiwa-peristiwa di Iraq, Suriah, dan Yaman menunjukkan bagaimana sentimen sektarian sering dimobilisasi untuk kepentingan politik. Meski demikian, upaya rekonsiliasi antar-mazhab terus dilakukan, seperti melalui Pesan Amman dan dialog-dialog lintas mazhab lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri akar historis konflik Sunni-Syiah, menganalisis perkembangan geopolitik kontemporer, serta mengkaji berbagai tantangan dan peluang menuju koeksistensi damai dalam tubuh umat Islam.

Kata kunci: Geopolitik; Konflik Sektarian; Rekonsiliasi; Sunni; Syiah

Pendahuluan

Sejarah Islam adalah kisah panjang yang penuh warna – terbentang dari masa kenabian hingga zaman modern, mencerminkan dinamika sosial, politik, serta pemikiran yang terus berkembang. Di sepanjang sejarah itu, umat Islam tidak pernah benar-benar statis; selalu ada perdebatan, dialog, dan perbedaan pandangan yang justru memperkaya khazanah keislaman. Salah satu dinamika terpenting dalam perjalanan itu adalah lahirnya berbagai mazhab atau aliran pemikiran (Nasution, 1985). Di antara sekian banyak aliran tersebut, Syiah menempati posisi yang sangat menarik. Mazhab ini tidak hanya berbicara soal teologi, tetapi juga menyentuh lapisan budaya, sosial, bahkan politik umat Islam. Dalam banyak konteks sejarah, Syiah menjadi bagian yang turut membentuk wajah peradaban Islam di berbagai kawasan, mulai dari Timur Tengah hingga Asia Selatan (Nasr, 2006).

Kajian tentang asal-usul dan perkembangan Syiah menjadi penting, bukan semata untuk memahami perbedaan dalam Islam, tetapi juga untuk melihat bagaimana ide dan kekuasaan berkelindan dalam sejarah umat. Isu kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW – yang semula bersifat politis – berubah menjadi persoalan teologis dan identitas keagamaan yang kompleks (Ash-Shiddieqy, 1990). Dari titik inilah Syiah tumbuh dan berkembang menjadi tradisi yang kokoh, dengan ajaran, struktur, dan ekspresi budaya yang khas (Amin, 1969).

Awal kemunculan Syiah berakar pada perdebatan tentang siapa yang paling berhak memimpin umat setelah Nabi wafat. Sebagian sahabat mendukung Ali bin Abi Talib karena dianggap memiliki legitimasi spiritual dan kedekatan khusus dengan Nabi. Kelompok pendukung inilah yang kemudian dikenal sebagai *Syī'atu 'Ali* – pengikut Ali – yang menjadi embrio mazhab Syiah. Seiring waktu, perbedaan pandangan yang awalnya bersifat politik berkembang menjadi perbedaan teologis dan spiritual hingga membentuk sistem keyakinan dan hukum yang mandiri (Nasr, 2006; Ash-Shiddieqy, 1990).

Para peneliti seperti Seyyed Hossein Nasr dan Vali Nasr melihat bahwa akar kemunculan Syiah tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah awal Islam dan pergulatan kekuasaan setelah wafatnya Nabi (Nasr, 1981; Nasr, 2006). Sementara itu, Heinz Halm menekankan bahwa pertumbuhan Syiah adalah proses panjang yang diwarnai adaptasi terhadap lingkungan sosial dan politik di berbagai wilayah (Halm, 1991). Dalam hal ini, Syiah tidak hanya lahir dari konflik, tetapi juga dari upaya mempertahankan legitimasi dan identitas di tengah perubahan sejarah.

Dari sudut sosial-politik, perjalanan Syiah menunjukkan pola yang beragam. Di Iran, Syiah Imāmiyah kemudian menjadi mazhab resmi negara sejak masa Dinasti Safawiyah, dan pengaruhnya terus terasa hingga kini (Amanat, 2017). Di Iraq dan Lebanon, komunitas Syiah menjadi kekuatan politik penting, tetapi juga terus berinteraksi – kadang bersaing, kadang berkoalisi – dengan kelompok Sunni (Louër, 2012). Sementara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Syiah berkembang dalam

ruang sosial yang lebih kecil, menghadapi tantangan identitas dan penerimaan masyarakat yang beragam (Azra, 2006).

Meskipun literatur yang ada telah mengupas aspek-aspek Syiah secara mendalam, masih terdapat kebutuhan akan studi yang bersifat aktual dan komprehensif. Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi adalah kurangnya analisis terpadu yang mampu menelusuri secara kronologis dan tematik empat dimensi krusial ini dalam satu kerangka: (1) transisi Syiah dari isu politis ke doktrin teologis, (2) perkembangan pemikiran internalnya, (3) pola dan faktor penyebarannya ke berbagai wilayah, dan (4) analisis akar sejarah konflik Syiah-Sunni. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan sebuah narasi sejarah yang utuh dan saling terhubung.

Berdasarkan berbagai dinamika sejarah, ideologis, dan sosial-politik yang kompleks ini, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menyajikan analisis historis-sintetik yang komprehensif mengenai evolusi mazhab Syiah dalam khazanah Islam. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci yang saling terkait. Pertama, tulisan ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana transisi ideologis Syiah terjadi, yaitu dari gerakan politik pendukung Ali menjadi mazhab teologis yang berpusat pada doktrin *Imāmah*. Kedua, akan ditelusuri perkembangan pemikiran Syiah seiring sejarah, mengidentifikasi tokoh dan fase kunci dalam pembentukan doktrinnya. Ketiga, penelitian ini bertujuan menganalisis pola penyebaran Syiah ke berbagai kawasan di dunia Muslim, mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan Syiah tumbuh di wilayah non-Arab seperti Persia dan Asia Tenggara. Terakhir, sekaligus yang sangat relevan secara kontemporer, artikel ini akan mengeksplorasi akar sejarah dan manifestasi utama dari konflik Syiah-Sunni sebagai bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah Islam. Melalui penyelesaian masalah-masalah ini, tulisan ini juga mencoba memberikan pemahaman yang lebih seimbang tentang keberagaman internal Syiah dan bagaimana ia menjadi bagian dari mozaik besar tradisi Islam (Bagir, 2004).

Secara Akademik, penelitian ini relevan karena menawarkan sintesis historis yang menyatukan berbagai aspek Syiah, memberikan kerangka analitis yang lebih kaya bagi peneliti selanjutnya. Secara Sosial, pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai sejarah Syiah dan dinamika interaksinya dengan Sunni sangat krusial dalam upaya mendorong toleransi, dialog, dan koeksistensi di tengah isu-isu sektarian global.

Metode Penelitian

Penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif historis, dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab klasik Syiah, karya-karya sejarah Islam, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, untuk

menggambarkan proses munculnya, berkembangnya, serta menyebarunya mazhab Syiah secara kronologis dan kontekstual. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif dalam menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara mazhab Syiah dan mazhab lainnya dalam Islam.

Pembahasan

A. Sejarah Syiah: Peralihan Gerakan Politik Menjadi Mazhab Teologis

Wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 H (632 M) menjadi titik balik krusial dalam sejarah Islam, meninggalkan umat Muslim dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya tanpa kepemimpinan langsung dari Nabi. Ketidakjelasan mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan politik dan spiritual segera memicu perdebatan sengit di antara para sahabat. Absennya petunjuk eksplisit dari Nabi mengenai penggantinya membuka ruang bagi berbagai interpretasi dan klaim, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan model kekhalifahan melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah ini, di mana Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama, menjadi fondasi awal bagi sistem politik Islam.

Perpecahan ini muncul karena sebagian sahabat, pendukung dari Ali bin Abi Talib, meyakini bahwa suksesi seharusnya berdasarkan hubungan kekerabatan dan penunjukan ilahi, bukan melalui musyawarah. Mereka berargumen bahwa Rasulullah SAW telah memberikan isyarat-isyarat mengenai Ali sebagai penerusnya. Ketidaksepakatan fundamental inilah yang mulai membentuk dua pandangan berbeda tentang kepemimpinan dalam Islam: satu yang mendukung sistem pemilihan dan satu lagi yang mendukung suksesi berdasarkan keturunan dan penunjukan. Peristiwa pasca wafatnya Nabi ini, dengan segala dinamikanya, membentuk pandangan politik dan teologis yang kompleks bagi generasi Muslim berikutnya.

Dengan demikian, periode pasca wafatnya Rasulullah SAW adalah masa pembentukan dan penentuan arah bagi umat Muslim. Keputusan-keputusan yang diambil, baik dalam hal suksesi kepemimpinan maupun dalam penyelesaian konflik awal, memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan struktur politik dan mazhab dalam Islam. Perdebatan mengenai legitimasi kekuasaan, kriteria kepemimpinan, dan otoritas interpretasi agama menjadi isu sentral yang akan terus bergulir, pada akhirnya melahirkan perbedaan-perbedaan mendasar yang memisahkan umat Islam ke dalam berbagai faksi dan aliran pemikiran.

Konflik suksesi pasca wafatnya Rasulullah SAW utamanya terpusat pada figur Ali bin Abi Talib, sepupu sekaligus menantu Nabi, dan para khalifah awal yang terpilih. Setelah Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama melalui proses Saqifah, Ali dan sebagian kecil sahabat lainnya awalnya enggan untuk membaiatnya, meyakini bahwa mereka memiliki klaim yang lebih kuat atas kepemimpinan berdasarkan kedekatan dengan Nabi dan penunjukan yang diyakini secara implisit.

Namun, demi menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan yang lebih besar, Ali R.A. akhirnya memberikan baiat kepada Abu Bakar R.A., dan kemudian kepada Umar bin Khattab R.A. dan Utsman bin Affan R.A.

Ketidakpuasan terhadap tiga khalifah awal, dari Ibnu Khaldun "Syiah muncul ketika Rasulullah SAW. wafat. Saat itu Ahlul Bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam. Kekhalifahan hanyalah hak mereka, bukan untuk orang Quraisy lain. Saat itu pula sekelompok sahabat Nabi SAW. mendukung Ali bin Abi Talib dan memandangnya lebih berhak ketimbang yang lain untuk menjadi pemimpin. Namun, ketika kepemimpinan itu beralih kepada selain Ali, mereka pun mengeluhkan kejadian itu. "Dan lebih khusus pada era Utsman bin Affan R.A. di akhir masa kekhalifahannya, semakin memperkeruh suasana politik. Tuduhan nepotisme dan penyimpangan dalam pemerintahan Utsman memicu pemberontakan yang berujung pada pembunuhan. Peristiwa ini membuka jalan bagi Ali untuk akhirnya menjadi khalifah keempat. Namun, masa kekhalifahan Ali diwarnai oleh konflik internal yang parah, termasuk perang saudara dengan Aisyah R.A. (Perang Jamal) dan Muawiyah bin Abi Sufyan R.A. (Perang Shiffin). Konflik ini bukan hanya perebutan kekuasaan politik, tetapi juga merepresentasikan perbedaan pandangan teologis tentang keadilan, kepemimpinan, dan hak atas otoritas dalam Islam.

Intensitas konflik suksesi ini, terutama pada masa kekhalifahan Ali, memiliki dampak besar bagi perkembangan mazhab Syiah di masa mendatang. Para pendukung Ali, yang dikenal sebagai "*Syī'ah 'Ali*" (golongan Ali), meyakini bahwa Ali adalah pemimpin yang sah dan satu-satunya yang berhak memimpin umat setelah Nabi karena merupakan Ahlul Bait yang bukan hanya berdarah Quraisy saja, serta berdasarkan penunjukan ilahi dan kesempurnaan pribadinya. Penolakan terhadap kekhalifahan Muawiyah dan dukungan kuat terhadap hak Ali untuk memimpin menjadi inti dari identitas kelompok ini, yang kemudian berkembang menjadi mazhab dengan doktrin-doktrin teologis yang khas mengenai *Imāmah* dan keturunan Nabi sebagai sumber otoritas spiritual dan politik.

Perpecahan politik yang bermula dari konflik suksesi pasca wafatnya Rasulullah SAW secara bertahap bertransformasi menjadi perbedaan teologis yang mendalam, melahirkan mazhab Syiah. Pada mulanya, "*Syī'ah 'Ali*" lebih merupakan kelompok politis yang mendukung hak Ali bin Abi Talib atas kekhalifahan. Namun, setelah pembunuhan Ali dan pengkhianatan yang dialami oleh putranya, Hasan, yang dipaksa melepaskan klaimnya atas kekhalifahan kepada Muawiyah, serta tragedi Karbala yang menimpa Husain, gagasan tentang kepemimpinan yang sah (*Imāmah*) tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah politik semata, melainkan juga sebagai prinsip fundamental keimanan.

Tragedi Karbala, di mana Husain, cucu Nabi, dibunuh secara brutal bersama keluarganya oleh pasukan Yazid (putra Muawiyah), menjadi titik balik yang monumental. Peristiwa ini mengkonsolidasikan identitas kelompok yang menolak

legitimasi kekuasaan Bani Umayyah dan memperkuat keyakinan bahwa *Imāmah* adalah hak eksklusif Ahlul Bait (keluarga Nabi), yang mana landasannya sudah mengakar di lubuk hati para fanatik Ali. Dari sini, dukungan terhadap keturunan Ali tidak hanya didasarkan pada loyalitas politik, tetapi juga pada keyakinan teologis bahwa Imam-imam dari Ahlul Bait adalah penerus spiritual Nabi, yang diamanahi pengetahuan ilahi dan memiliki otoritas mutlak dalam menafsirkan agama.

Oleh karena itu, gerakan politis “*Syī’ah ‘Ali*” secara bertahap mengerucut menjadi mazhab teologis yang komprehensif. Mereka mengembangkan doktrin-doktrin khas seperti konsep *Imāmah*, *‘Ismah* (kemaksuman Imam), *‘ilm al-gaib* (pengetahuan gaib Imam), dan *rajā’ah* (kembalinya Imam Mahdi). Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya tentang siapa yang seharusnya memimpin, tetapi juga tentang sifat otoritas agama, sumber hukum, dan bahkan eskatologi. Dengan demikian, apa yang awalnya adalah perselisihan politik akhirnya berkembang menjadi sistem keyakinan yang berbeda secara fundamental dari mayoritas Sunni, dengan akar historis dan teologis yang kuat.

B. Perkembangan Pemikiran dan Teologi Syiah

Perpecahan dalam Syiah, seperti yang diidentifikasi oleh Abu al-Khair al-Bagdadi ke dalam empat kelompok besar (Zaidiyah, Ismailiyah, Isna ‘Asyariyah, dan Ghulat), utamanya berakar pada perbedaan prinsip keyakinan mengenai *Imāmah*. Konsep *Imāmah* sangat vital bagi Syiah, dengan tugas dan tanggung jawab Imam hampir sejajar dengan Nabi dalam menjelaskan Al-Qur'an, hukum syariat, mencegah perpecahan, dan menegakkan keadilan. Perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak menggantikan Imam menjadi pemicu utama perpecahan awal, seperti yang terlihat setelah Imam Husain, yang memunculkan sekte Kaisaniyah (yang kemudian tidak berkembang) dan cikal bakal Zaidiyah yang mendukung Ali Zainal Abidin bin Husain (Shihab, 2007).

Sekte Zaidiyah, yang mengusung Zaid bin Ali sebagai Imam kelima, dikenal sebagai kelompok Syiah yang paling moderat dan dekat dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Mereka meyakini *Imāmah* dapat diberikan kepada siapa saja dari keturunan Hasan atau Husain yang memiliki ilmu, adil, berani melawan kezaliman, dan mengangkat senjata. Zaidiyah menolak konsep *taqiyah* secara luas dan lebih memilih pendekatan konfrontatif terhadap penguasa zalim, mencontoh sikap Ali dan Husain. Ini berbeda dengan pendekatan kelompok Syiah lain yang memilih *taqiyah* untuk melindungi keyakinan mereka dari kekejaman Dinasti Mu'awiyah (Syahrastani, 1993).

Di era kontemporer, teologi *output Imāmah* Zaidiyah yang bersifat militeristik (mengangkat senjata) ini memiliki implikasi geopolitik signifikan di Yaman. Meskipun secara tradisional mereka moderat, kebangkitan gerakan Houthi (*Anṣārullāh*)—yang berakar dari tradisi Zaidiyah—menunjukkan perkembangan politik yang radikal. Gerakan Houthi telah mempolitisasi konsep perlawan-

Zaidiyah, mengubahnya menjadi kekuatan militer dan politik regional yang kini menjadi aktor utama dalam konflik di Yaman dan secara strategis bersekutu dengan kekuatan Syiah di luar.

Ismailiyah dan Isna 'Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam) sama-sama berasal dari Syiah Imāmiyah, yang mengakui Abu Ja'far Muhammad al-Baqir sebagai Imam kelima. Perpecahan antara keduanya terjadi setelah wafatnya Imam Ja'far al-Shadiq. Ismailiyah meyakini Ismail, putra Ja'far al-Shadiq, sebagai Imam ketujuh, meskipun Ismail wafat mendahului ayahnya, sehingga mereka juga dikenal sebagai Syiah Sab'iyah atau al-Batiniyah karena kepercayaan pada makna batin Al-Qur'an dan Sunnah (Syahrastani, 1993).

Perkembangan Ismailiyah kontemporer menunjukkan model pengaruh yang berbeda. Faksi mayoritas Nizari Ismailiyah saat ini dipimpin oleh Aga Khan (Pangeran Karim Aga Khan IV), Imam ke-49 yang hidup. Pengaruhnya diwujudkan secara non-politik melalui *Aga Khan Development Network* (AKDN). AKDN berfokus pada pembangunan sosial-ekonomi (pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan) di negara-negara berkembang. Model ini menunjukkan bahwa *Imāmah* Ismailiyah kini berfungsi sebagai institusi filantropi global yang mengedepankan etika layanan sosial dan pluralisme, jauh dari narasi konflik sektarian.

Adapun Isna 'Asyariyah mengakui Musa al-Kazim sebagai Imam ketujuh dan melanjutkan garis Imam hingga dua belas Imam, menjadi kelompok Syiah mayoritas saat ini. Disebut sebagai Syiah Imam dua belas karena kelompok syiah ini meyakini dua belas imam secara berurutan yaitu: (1) Sayyidina Ali bin Abi Talib; (2) Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib; (3) Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Talib; (4) 'Ali Zainal 'Abidin bin Husein bin 'Ali bin Abi Talib; (5) Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin; (6) Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir; (7) Musa al-Kazim bin Ja'far Shadiq; (8) Ali Ridla bin Musa al-Kazhim; (9) Muhammad al-Jawwad bin 'Ali Rida; (10) Ali bin Muhammad bin Ali Rida; (11) Hasan bin Ali, bin Muhammad al-Askari; (12) Muhammad bin Hasan al-Mahdi (Thaba'thaba'i, 1975).

Sebagai mazhab resmi di Iran, Isna 'Asyariyah adalah faksi Syiah yang paling dominan secara politik di panggung global. Pasca-Revolusi Islam Iran 1979, doktrin *Velayat-e Faqih* (Perwalian Ahli Fiqih) menjadi contoh nyata bagaimana keyakinan teologis tentang keghaiban Imam ke-12 diinterpretasikan untuk melegitimasi kekuasaan politik kontemporer, menjadikan Iran sebagai pusat kekuatan ideologis dan geopolitik Syiah di Timur Tengah.

Perpecahan ekstremis lainnya berasal dari kelompok Gulat, yang saat ini sebagian besar telah punah karena ajaran-ajaran mereka dipandang keluar dari batas Islam. Contoh kelompok Gulat termasuk al-Sabaiyah yang mengagungkan Abdullah bin Saba', Al-Khaththabiyah yang menuhankan Imam Ja'far al-Shadiq dan leluhurnya, serta Al-Gurabiyah yang meyakini Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu

kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok seperti Al-Qaramitah bahkan lebih ekstrem dengan menuhankan Ali bin Abi Talib, membolehkan kebebasan seks, dan menyerbu Makkah serta merampas Hajar al-Aswad, menunjukkan penyimpangan akidah yang signifikan dari arus utama Islam.

C. Penyebaran Mazhab Syiah di Dunia Islam

1. Iran dan Revolusi Islam 1979

Iran merupakan benteng utama Syiah Imāmiyah di dunia, dengan mazhab ini menjadi agama resmi negara sejak era Safawiyah pada abad ke-16. Sejak saat itu, identitas nasional Iran sangat terikat dengan identitas Syiah. Namun, penyebaran dan konsolidasi Syiah di Iran mencapai puncaknya dengan meletusnya Revolusi Islam pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini. Revolusi ini tidak hanya menggulingkan monarki Syah yang didukung Barat, tetapi juga mendirikan sebuah republik Islam teokratis berdasarkan konsep *Velayat-e Faqih* (Perwalian *Fuqahā*), di mana ulama tertinggi memegang kendali pemerintahan.

Revolusi Islam Iran memiliki dampak yang sangat besar terhadap penyebaran dan persepsi Syiah secara global. Ia memberikan model bagi negara Islam yang diperintah oleh ulama Syiah, serta menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam lainnya di seluruh dunia. Iran juga secara aktif mempromosikan ideologi Syiah dan mendukung komunitas Syiah di berbagai negara melalui media, pendidikan, dan dukungan politik, menjadikannya pusat gravitasi bagi banyak Syiah di seluruh dunia. Hal ini seringkali menimbulkan ketegangan dengan negara-negara mayoritas Sunni yang melihatnya sebagai upaya ekspansi pengaruh.

Meskipun Revolusi Islam awalnya bersifat domestik, dampaknya telah meresap ke dalam dinamika politik dan keagamaan di Timur Tengah dan sekitarnya. Dengan adanya Iran sebagai negara Syiah yang kuat, mazhab ini mendapatkan legitimasi dan kekuatan politik yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah modern (Keddie, 2006). Hal ini juga memicu kebangkitan identitas Syiah di wilayah lain, sekaligus memperuncing polarisasi sektarian antara Syiah dan Sunni di beberapa wilayah konflik.

2. Syiah di Iraq, Yaman, dan Negara-Negara Lain

Selain Iran, Iraq adalah negara lain dengan mayoritas Syiah Imāmiyah, terutama di wilayah selatan. Sejarah Syiah di Iraq sangat mendalam karena di sana terdapat banyak situs suci Syiah, termasuk makam Imam Ali di Najaf dan Imam Husain di Karbala. Meskipun menjadi mayoritas, Syiah di Iraq pernah mengalami penindasan brutal di bawah rezim Saddam Hussein yang Sunni. Namun, setelah invasi AS pada tahun 2003 dan jatuhnya Saddam, Syiah Iraq kini mendominasi lanskap politik dan pemerintahan negara, yang secara signifikan mengubah dinamika kekuatan regional.

Di Yaman, Syiah diwakili oleh mazhab Zaidiyah, yang merupakan cabang Syiah yang berbeda dari Imāmiyah dan memiliki pandangan yang lebih dekat dengan Sunni dalam beberapa aspek teologis dan fikih (Cole, 2007). Kelompok Houthi, yang merupakan kekuatan dominan dalam konflik Yaman saat ini, adalah penganut Zaidiyah. Konflik di Yaman seringkali dipandang sebagai bagian dari persaingan pengaruh antara Iran (yang mendukung Houthi) dan Arab Saudi (yang mendukung pemerintah Yaman yang Sunni), meskipun akar konfliknya jauh lebih kompleks, melibatkan isu kesukuan, politik lokal, dan ekonomi (Philips, 2007).

Selain Iraq dan Yaman, komunitas Syiah juga tersebar di berbagai negara lain seperti Lebanon (di mana mereka adalah kelompok demografi terbesar dan memiliki kekuatan politik yang signifikan melalui partai Hizbulullah), Bahrain (majoritas penduduk Syiah tetapi diperintah oleh monarki Sunni), Arab Saudi (terutama di Provinsi Timur), dan juga di Pakistan, India, serta beberapa negara Afrika. Keberadaan komunitas Syiah di negara-negara ini seringkali menghadapi tantangan politik dan sosial yang unik, tergantung pada konteks sejarah dan demografi setempat.

3. Syiah di Indonesia

Meskipun mayoritas penduduk Muslim di Asia Tenggara adalah Sunni bermazhab Syafii, komunitas Syiah juga ada di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kehadiran Syiah di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, seringkali dikaitkan dengan kedatangan pedagang dan ulama dari Persia atau Hadramaut yang membawa pengaruh Syiah, meskipun tidak dalam bentuk mazhab yang terlembaga secara kuat. Sebagian besar Syiah di Indonesia adalah penganut Syiah Imāmiyah (Fanani, 2010). Jumlah mereka relatif kecil dibandingkan dengan populasi Muslim Sunni, dan seringkali terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya, dan Bondowoso.

Perkembangan Syiah di Indonesia, terutama setelah Revolusi Islam Iran 1979, mengalami peningkatan visibilitas dan pertumbuhan. Namun, hal ini juga disertai dengan tantangan dan gesekan dengan kelompok-kelompok Sunni konservatif yang memandang Syiah sebagai ajaran sesat atau menyimpang dari Islam. Beberapa komunitas Syiah di Indonesia bahkan pernah mengalami diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan fisik, seperti yang terjadi di Sampang, Madura, yang menunjukkan kerentanan posisi mereka dalam masyarakat mayoritas Sunni (Nasr, 2006).

Meskipun demikian, komunitas Syiah di Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan identitas dan ajaran mereka. Mereka aktif dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan membangun lembaga-lembaga keagamaan. Namun, diskursus seputar Syiah di Indonesia masih didominasi oleh perdebatan teologis dan politis yang kompleks, seringkali dipengaruhi oleh dinamika konflik

sektarian di Timur Tengah, yang menjadikan penerimaan dan toleransi terhadap Syiah sebagai isu yang sensitif dalam konteks keindonesiaan (Nurhadi, 2012).

D. Konflik Syiah-Sunni dan Upaya Rekonsiliasi

Hubungan antara Syiah dan Sunni telah mengalami pasang surut sepanjang sejarah Islam, bergeser dari koeksistensi damai ke konflik yang membara. Perbedaan mendasar dalam pandangan mengenai suksesi kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. dan otoritas keagamaan telah menjadi akar perpecahan ini. Meskipun kedua mazhab sepakat pada prinsip-prinsip dasar Islam seperti tauhid, kenabian Muhammad, dan rukun Islam, perbedaan dalam doktrin *Imāmah* (bagi Syiah) dan Khilafah (bagi Sunni) membentuk jurang pemisah teologis dan politik yang signifikan. Dalam banyak konteks, perbedaan ini dieksplorasi untuk tujuan politik, mengubah perbedaan doktrinal menjadi permusuhan sektarian yang intens dan berlarut-larut (Marckinowski, 2010).

Pada era kontemporer, hubungan Syiah dan Sunni seringkali diperparah oleh geopolitik regional, terutama di Timur Tengah. Negara-negara dengan mayoritas Sunni, seperti Arab Saudi, dan negara Syiah seperti Iran, seringkali terlibat dalam persaingan pengaruh yang memanifestasikan dirinya dalam konflik proksi di berbagai negara. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga meresap ke dalam masyarakat, menciptakan ketegangan komunal dan memicu narasi kebencian melalui media dan wacana keagamaan. Meskipun ada upaya dari kedua belah pihak untuk menekankan kesamaan, perbedaan fundamental ini tetap menjadi tantangan serius bagi persatuan umat Islam (Nasr, 2006).

Perbedaan mazhab antara Syiah dan Sunni seringkali berujung pada stigmatisasi, diskriminasi, dan konflik sektarian di berbagai belahan dunia Islam. Kelompok mayoritas, baik Sunni maupun Syiah tergantung konteks geografisnya, cenderung memandang kelompok minoritas dengan kecurigaan atau bahkan permusuhan, seringkali didasari oleh kurangnya pemahaman tentang ajaran masing-masing (Hashim, 2014). Narasi yang salah atau dilebih-lebihkan mengenai praktik dan keyakinan mazhab lain tersebar luas, memupuk prasangka dan kebencian. Hal ini menciptakan lingkungan di mana identitas mazhab bisa menjadi sumber marginalisasi sosial dan ekonomi, serta target kekerasan.

Konflik sektarian yang berakar dari perbedaan Syiah-Sunni telah menyebabkan penderitaan yang meluas di beberapa wilayah, seperti di Iraq, Suriah, Yaman, dan Pakistan (Human Right Watch, 2013). Pertempuran antara kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan salah satu mazhab, atau serangan terhadap komunitas minoritas, telah mengakibatkan ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur. Kekerasan ini seringkali dipicu oleh faktor politik dan ekonomi yang kompleks, namun perbedaan mazhab dieksplorasi untuk memobilisasi dukungan dan membenarkan tindakan brutal. Kehadiran aktor non-negara dan intervensi asing semakin memperparah konflik ini, mengubahnya menjadi perang proksi regional.

Meskipun terdapat ketegangan dan konflik yang signifikan, ada berbagai upaya dialog dan rekonsiliasi antar mazhab yang dilakukan oleh ulama, cendekiawan, dan aktivis perdamaian dari kedua belah pihak. Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman, mengurangi prasangka, dan mendorong koeksistensi damai berdasarkan prinsip-prinsip umum Islam. Salah satu contoh penting adalah Pesan Amman (*Amman Message*) pada tahun 2004 (Al-Azzami, 2007) yang dikeluarkan oleh para ulama Sunni dan Syiah terkemuka, yang secara eksplisit mengakui legalitas mazhab-mazhab Islam utama, termasuk mazhab-mazhab Syiah, dan menyerukan persatuan serta larangan mengkafirkan satu sama lain.

Upaya dialog juga dilakukan melalui konferensi-konferensi internasional, seminar akademik, dan program pertukaran budaya yang melibatkan ulama dan cendekiawan dari berbagai latar belakang mazhab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan saling pengertian melalui diskusi terbuka tentang perbedaan teologis dan sejarah, serta untuk menemukan titik temu dalam ajaran Islam yang mempersatukan. Meskipun proses ini lambat dan seringkali menghadapi resistensi dari elemen-elemen ekstremis di kedua belah pihak, inisiatif ini menunjukkan bahwa keinginan untuk perdamaian dan persatuan tetap ada di antara sebagian besar umat Islam (Cole, 2007).

Namun, keberhasilan upaya dialog dan rekonsiliasi sangat bergantung pada kemauan politik dan dukungan dari para pemimpin agama dan negara. Tantangan terbesar adalah mengatasi narasi kebencian yang telah mengakar kuat dan menghadapi kelompok-kelompok yang diuntungkan dari perpecahan. Untuk mencapai rekonsiliasi sejati, diperlukan komitmen jangka panjang untuk pendidikan, penghapusan diskriminasi sistemik, dan pembangunan kepercayaan di antara komunitas-komunitas yang terpecah, sehingga perbedaan mazhab dapat diakui tanpa harus mengarah pada konflik.

Penutup

Perpecahan antara Syiah dan Sunni bermula dari isu suksesi kepemimpinan pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa Saqifah dan klaim Ali bin Abi Talib menjadi titik tolak yang mengubah perbedaan politis menjadi jurang teologis. Konflik ini, yang memuncak pada peristiwa Karbala, mengkristalkan identitas Syiah dengan doktrin *Imāmah* yang khas, berbeda fundamental dari konsep kekhilafahan Sunni. Bagi mazhab Syiah, khususnya *Imāmiyah*, konsep *Imāmah* jauh melampaui kepemimpinan politik, melainkan menjadi pilar keimanan. Imam dipandang sebagai penunjukan ilahi, maksum (terjaga dari dosa), dan memiliki otoritas spiritual serta temporal mutlak. Keyakinan ini membedakan mereka secara signifikan dari Sunni yang memandang kepemimpinan sebagai hasil pemilihan dan tidak mengaitkannya dengan kemaksuman atau otoritas ilahi.

Penyebaran mazhab Syiah, terutama setelah Revolusi Islam Iran 1979, telah memengaruhi dinamika geopolitik global. Konflik dan polarisasi sektarian antara Syiah dan Sunni kian meruncing di banyak wilayah, seperti di Iraq, Suriah, dan Yaman, di mana perbedaan mazhab sering dieksplorasi untuk tujuan politik, menyebabkan diskriminasi, kekerasan, dan destabilisasi regional. Meskipun terdapat ketegangan dan konflik yang mendalam, upaya dialog dan rekonsiliasi antar-mazhab terus dilakukan oleh berbagai pihak. Inisiatif seperti Pesan Amman menunjukkan adanya keinginan untuk membangun saling pengertian dan persatuan. Namun, keberhasilan rekonsiliasi memerlukan komitmen berkelanjutan, mengatasi narasi kebencian, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi koeksistensi damai di tengah keragaman interpretasi dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Azzami, A. (2007). *The Amman message: A call for Islamic unity. The Muslim World.*
- Amanat, A. (2017). *Iran: A modern history.* Yale University Press.
- Amin, A. (1969). *Fajr al-Islam.* Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1990). *Sejarah dan pengantar ilmu kalam.* Bulan Bintang.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation. Mizan.*
- Bagir, M. Z. A. (Ed.). (2004). *Pluralisme, konflik, dan perdamaian.* CRCS UGM.
- Cole, J. R. I. (2007). *Sacred space and holy war: The politics, culture, and history of Shi'ite Islam.* I.B. Tauris.
- Fanani, M. (2010). Dinamika gerakan Syiah di Indonesia: Kajian atas konflik Syiah-Sunni di Sampang, Madura. *Jurnal Komunikasi Islam.*
- Halm, H. (1991). *Shi'ism.* Edinburgh University Press.
- Hashim, A. (2014). The Sunni-Shi'a divide: Identity and conflict in the Middle East. *RUSI Journal*, 159(3), 68–78.
- Human Rights Watch. (2013). *Sectarian violence in Iraq: The cycle of violence and the impunity of perpetrators.* Human Rights Watch.
- Keddie, N. R. (2006). *Iran and the Muslim world: Resistance and revolution.* New York University Press.
- Louër, L. (2012). *Shiism and politics in the Middle East.* Hurst & Company.
- Marcinkowski, C. (2010). Shi'ite-Sunni relations in the Middle East: An outline. *Journal of Shi'a Islamic Studies.*
- Nasr, S. H. (1981). *Islamic life and thought.* SUNY Press.
- Nasr, V. (2006). *The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future.* W. W. Norton & Company.
- Nasr, S. V. R. (2006). *The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future.* W. W. Norton & Company.

- Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. UI Press.
- Nurhadi, S. (2012). Syiah di Indonesia: Dari historiografi hingga kontroversi. *Jurnal Lektur Keagamaan*.
- Philips, J. (2017). Yemen's Zaydis: A long history of marginalization. *The Century Foundation*. <https://tcf.org/content/report/yemens-zaydis-long-history-marginalization/>
- Shihab, M. Q. (2007). *Sunnah-Syiah bergandengan tangan! Mungkinkah: Kajian atas konsep ajaran dan pemikiran*. Lentera Hati.
- Syahrastani. (1993). *Al-Milal wa al-Nihal*. Dar al-Ma'rifah.
- Thabathaba'i, M. H. (1975). *Shi'ite Islam* (S. H. Nasr, Trans.). State University of New York Press.